

PARTISIPASI WARGA TERDAMPAK BENCANA DALAM PROGRAM MITIGASI BENCANA ERUPSI MERAPI DI YOGYAKARTA

Muhammad Wahyu Kuncoro dan Anwar

Fakultas Psikologi
Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Jalan Wates Km. 10 Yogyakarta, Indonesia 55753

wahyu_umby@yahoo.co.id, anwarnugroho@yahoo.com

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji peranan variabel penilaian keadilan prosedural, penilaian keadilan distributif dan penilaian keadilan interaksional terhadap partisipasi warga dalam program mitigasi bencana erupsi merapi. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei. Hasil penelitian menunjukkan F regresi sebesar 35,325 dengan $p < 0,01$, sehingga menunjukkan adanya peranan yang signifikan antara variabel penilaian keadilan prosedural, penilaian keadilan distributif dan penilaian keadilan interaksional terhadap variabel partisipasi warga dalam program mitigasi bencana erupsi merapi.

Kata kunci : *penilaian keadilan interaksional; distributif; interaksional dan partisipasi program mitigasi bencana*

PENDAHULUAN

Indonesia terletak pada titik temu 4 lempeng utama bumi, yakni: i) Lempeng Pasifik; ii) Lempeng Eurasia; iii) Lempeng Samudra Hindia-Australia; dan iv) Lempeng Philipina. Bencana alam, khususnya bencana alam kebumihan di Indonesia, sangat erat kaitannya dengan posisi tektonik Indonesia tersebut. Konsep Tektonik Lempeng menekankan bahwa semua lempeng dunia selalu saling bergerak satu sama lainnya. Namun demikian hanya di pinggiran lempenglah terdapat aktivitas geodinamik yang menyebabkan konfigurasi bumi sebagaimana terlihat sekarang dan menjelaskan gejala-gejala bencana kebumihan dan juga mempengaruhi bencana kelautan dan bencana atmosferik, seperti konfigurasi benua dan distribusi benua dan samudra (Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Propinsi Jawa Barat, 2004).

Jadi, dapat dimengerti mengapa di Indonesia banyak sekali terjadi bencana kebumihan seperti gempa bumi, tsunami, peletusan vulkanik, serta tanah longsor. Disamping itu bencana kelautan dan bencana atmosferik yang satu sama lain erat hubungannya, datang silih berganti. Dengan alasan yang sama, gejala-gejala seperti El Nino, La Nina lahir pula di kepulauan Indonesia, di samping variasi-variasi iklim yang muncul diantara kepulauan Indonesia dan Benua Australia (Sadisun, 2004). Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat (Sadisun, 2004).

Peristiwa bencana tersebut tidak mungkin dihindari, tetapi yang dapat kita dilakukan adalah memperkecil terjadinya korban jiwa, harta maupun lingkungan. Banyaknya korban jiwa maupun harta benda dalam peristiwa bencana yang selama ini terjadi, lebih sering disebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman pemerintah maupun masyarakat terhadap potensi kerentanan bencana serta upaya mitigasinya.

Kegiatan mitigasi hendaknya merupakan kegiatan yang bersifat rutin dan berkelanjutan (*sustainable*). Hal ini berarti bahwa kegiatan mitigasi seharusnya sudah dilakukan dalam periode jauh-jauh hari sebelum kejadian bencana, yang sering kali datang lebih cepat dari waktu yang diperkirakan sebelumnya. Terkait dengan hal tersebut, maka pemerintah hendaknya aktif memberikan arahan yang tepat dan berkesinambungan dalam menghadapi peristiwa bencana. Setiap arahan harus tetap menjaga kesederhanaan sistem dan prosedur

Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan bencana adalah pilar utama dalam membangun manajemen bencana berbasis masyarakat untuk menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab di tingkat paling bawah agar dapat mendukung setiap inisiatif kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana. Perencanaan *bottom-up* merupakan sarana untuk melibatkan warga masyarakat agar berpartisipasi secara langsung. Partisipasi warga masyarakat dalam mengidentifikasi risiko dan tingkat prioritas diperlukan untuk mendesain kegiatan yang relevan dengan keadaan lingkungan dan kemampuan mereka.

Terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program mitigasi bencana tersebut, problem yang sering muncul adalah rendahnya partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam program tersebut. Partisipasi yang dimaksud adalah keikutsertaan masyarakat terdampak bencana (baik dampak primer maupun sekunder) untuk mengikuti seluruh prosedur mitigasi yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam pelaksanaannya, BNPB didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Mitra di lapangan, seperti Palang Merah Indonesia (PMI), atau organisasi non-pemerintah yang ditunjuk.

Seluruh prosedur mitigasi bencana menjadi tidak efektif apabila partisipasi warga terdampak bencana sangat rendah. Hal ini sering ditemui dalam setiap program mitigasi yang diselenggarakan dan dalam berbagai jenis bencana yang dihadapi.

Pada penelitian ini fokus permasalahan mengenai partisipasi warga dalam program mitigasi bencana adalah program mitigasi bencana erupsi Merapi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagaimana telah terjadi erupsi gunung Merapi pada tahun 2010 yang telah banyak menimbulkan korban jiwa serta kerugian material yang sangat besar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perlu dikaji tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi warga terdampak bencana khususnya erupsi Merapi. Wilayah terdampak bencana yang akan dilibatkan dalam penelitian ini adalah wilayah terdampak bahaya primer erupsi Merapi, yaitu di wilayah Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman dan wilayah terdampak bahaya sekunder erupsi Merapi, yaitu di masyarakat yang tinggal di bantaran sungai Code wilayah Kotamadya Yogyakarta. Sungai Code adalah salah satu sungai yang melintasi pusat kota Yogyakarta yang sering dilalui aliran lahar dingin dari gunung Merapi dan dihuni ribuan warga pada bantaran sungainya.

Partisipasi dalam program mitigasi bencana adalah seberapa besar keinginan warga terdampak bencana untuk mengikuti seluruh prosedur mitigasi bencana yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Program Mitigasi bencana merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang dikenal sebagai Siklus Manajemen Bencana, yang bertujuan untuk (1) mencegah kehilangan jiwa; (2) mengurangi penderitaan manusia; (3) memberi informasi masyarakat dan pihak berwenang mengenai risiko, serta (4) mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kehilangan sumber ekonomis (Rahmat, 2006).

Menurut Rahmat (2006) mitigasi bencana yang efektif harus memiliki tiga unsur utama, yaitu :

- a. Penilaian bahaya (*hazard assessment*); diperlukan untuk mengidentifikasi populasi dan aset yang terancam, serta tingkat ancaman.
- b. Peringatan (*warning*); diperlukan untuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan mengancam (seperti bahaya tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi, aliran lahar akibat letusan gunung berapi, dsb).
- c. Persiapan (*preparedness*). Kegiatan kategori ini tergantung kepada unsur mitigasi sebelumnya (penilaian bahaya dan peringatan), yang membutuhkan pengetahuan tentang daerah yang kemungkinan terkena bencana dan pengetahuan tentang sistem peringatan untuk mengetahui kapan harus melakukan evakuasi dan kapan saatnya kembali ketika situasi telah aman.

Keadilan Distributif

Equity theory adalah teori keadilan distributif karena lebih menekankan keadilan hasil (*outcome*) yang diterima orang-orang (Van den Bos, 2003). Walster, dkk (dalam Tyler, 1994) bahwa berkaitan dengan *equity theory*, orang-orang termotivasi untuk berusaha memaksimalkan sumber-sumber keuntungan yang diperoleh ketika berinteraksi dengan orang lain. Masih dalam Tyler (1994), Taylor dan Moghaddam menyimpulkan bahwa asumsi dasar dari *equity theory* adalah bahwa individu berusaha untuk memaksimalkan hasil (*outcome*) bagi dirinya oleh karenanya individu akan belajar bagaimana mengikuti aturan yang telah disepakati bersama.

Menurut Deustch (dalam Warner, dkk, 2005) keadilan distributif sebagai keadilan atas apa yang telah diterima sebagai hasil dari suatu keputusan pembagian. Tang & Baldwin (1996) mengatakan bahwa keadilan distributif meramalkan kepuasan terhadap hasil yang diterima (misal gaji) (*pay satisfaction*), selain itu juga menjelaskan evaluasi pada tingkat personal.

Dari berbagai pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa keadilan distribusi adalah persepsi keadilan terhadap besarnya hasil pembagian, pemberian dan pertukaran sumber daya yang diterima individu atau orang lain dalam kelompok.

Anteseden Keadilan Distributif :

- a. Gender. Perempuan lebih mudah puas dengan distribusi yang diterima dan juga lebih mudah memberikan penilaian adil.
- b. Situasi. Penilaian keadilan sangat dipengaruhi konteks dan situasi
- c. Karakteristik penilai. Individu yang memiliki sifat hedonis, berorientasi politis dan ingin cepat maju, biasanya lebih setuju dengan prinsip distribusi proporsional, sedangkan individu yang prososial, spiritualitas tinggi lebih memilih prinsip-prinsip sama rata (Feather, 1994).
- d. Harapan. Kesesuaian antara kenyataan dengan harapan maka akan dirasakan adanya keadilan. (Tyler, 1994).

- e. Kesejahteraan. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan yang diperoleh, maka akan mendorong untuk menilai distribusi yang ada sebagai sesuatu yang adil.

Keadilan Prosedural

Tyler (1989,1994) telah mengkonsepsikan keadilan prosedural adalah hubungan antara pembuat keputusan dan individu yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Orang-orang akan menilai keadilan prosedural atas interaksinya dengan orang lain dalam dimensi hubungan seperti netralitas, kepercayaan dan penghargaan.

Folger & Greenberg (dalam Moorman, 1991) menjelaskan bahwa keadilan prosedural adalah keadilan pada prosedur dan implementasi aturan pembagian. Sedangkan Bartol, dkk (2001) mengatakan bahwa keadilan prosedural adalah keadilan dari proses yang digunakan dalam membuat dan mengimplementasikan keputusan alokasi sumber daya. Leventhal mengajukan 6 (enam) aturan prosedural yang mempengaruhi penilaian keadilan oleh individu, yaitu : konsistensi, minimalisasi biasa, akurasi, dapat dikoreksi, representatif dan etis (Tylor, dkk,1995)

Dari berbagai pendapat dan pandangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang maksud dengan keadilan prosedural adalah keadilan pada proses pembuatan dan implementasi dari suatu kebijakan yang bertujuan untuk menentukan suatu sistem distribusi tertentu berdasarkan dimensi hubungan seperti netralitas, kepercayaan dan penghargaan diantara individu yang terlibat dalam pengambilan suatu keputusan.

Anteseden Penilaian Keadilan Prosedural

Ada dua anteseden pokok dari penilaian keadilan prosedural, yaitu kontrol dan penilaian keadilan interaksional. Thibaut & Walker (dalam Tyler,1994) mengajukan model psikologi berdasar pertukaran sosial untuk menjelaskan keadilan prosedural, yang disebut *control model*. Model ini mengusulkan bahwa distribusi kontrol diantara pihak – pihak yang saling berhadapan atau pihak ketiga pembuat keputusan, akan membentuk pandangan tentang keadilan prosedural. Thibaut & Walker (dalam Tyler,1989) membedakan antara dua tipe kontrol, yaitu : kontrol proses (*process control*) dan kontrol keputusan (*decision control*).

Berdasarkan konsep di atas maka kontrol adalah kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk menyajikan fakta-fakta dalam proses pengambilan keputusan dan kesempatan untuk ikut menentukan isi keputusan tersebut.

Keadilan interaksional (*Interactional justice*) adalah perlakuan interpersonal yang diterima seseorang sebagai suatu prosedur yang dibuat (Bies & Moag dalam Colquitt, 2001). Di dalam keadilan interaksional di asumsikan bahwa manusia sebagai anggota kelompok sangat memperhatikan tanda-tanda atau simbol yang menggambarkan posisi di dalam kelompok Suatu prosedur akan dinilai adil apabila penguasa atau pembuat keputusan memperlakukan mereka dengan penuh penghargaan dan kepekaan serta menjelaskan alasan pengambilan keputusan secara jelas (Tyler, 1994).

Keadilan Interaksional.

Lind & Tyler (dalam Tyler, 1989) mengusulkan sebuah istilah *relational model of justice*. Model ini mengasumsikan bahwa orang-orang menganggap penting hubungan sosial jangka panjang dengan penguasa atau institusi. *Relational model of justice* menjelaskan bahwa seseorang dipengaruhi pada rasa memiliki akan kelompok sosial dan mereka sangat memperhatikan tanda-tanda dan simbol-simbol yang memberikan informasi tentang posisinya dalam kelompok (Lind & Tyler dalam Tyler, 1994). Kelompok dimana

seseorang mengidentifikasi dan rasa memiliki dapat berupa kelompok kecil seperti keluarga, pertemanan, atau kelompok kerja. Selain itu kelompok tersebut bisa berupa kelompok lokal, negara atau partai politik (Tyler, 1989).

Berdasarkan pendapat di atas maka penilaian keadilan interaksional adalah persepsi individu terhadap perlakuan interpersonal yang diterima seseorang ketika suatu prosedur dilaksanakan.

Tyler (1994) mengidentifikasi ada tiga hal pokok dalam *relational model*, yaitu: netralitas dalam pengambilan keputusan (*neutrality*), kepercayaan terhadap pihak-pihak lain (*trust*) dan fakta-fakta tentang penghargaan sosial (*standing*).

- Netralitas (*neutrality*). Pengambilan keputusan didasari informasi-informasi nyata, tidak bias dan jujur.
- Kepercayaan (*trust*). Keyakinan bahwa pihak ketiga memiliki niat yang bijaksana dan bermaksud memperlakukan orang-orang dengan cara yang adil dan dapat diterima.
- Penghargaan (*standing*). Pelakuan yang sopan dan penuh penghargaan dari pemegang otoritas, merefleksikan bahwa individu ditempatkan pada posisi yang tinggi di dalam kelompok.

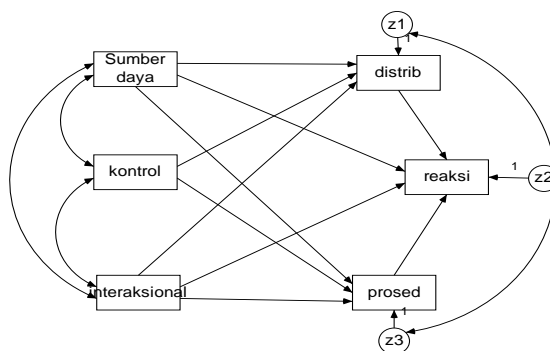
Saturated Justice Model.

Model keadilan Saturated (*Justice Model*) adalah suatu model penilaian keadilan yang dikembangkan oleh Tyler (1994). Pengembangan model penilaian keadilan ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan model, yaitu *Resources – Based Model of Justice* dan *Relational Model of Justice*.

Menurut Tyler (1994) model keadilan berbasis sumber daya (*Resources – Based Model of Justice*) ini memprediksikan bahwa ketergantungan orang-orang terhadap organisasi untuk mendapatkan keuntungan personal, dapat digunakan untuk menjelaskan peranan sumber motif-motif terhadap keadilan distributif. Pengorbanan waktu, menciptakan hubungan pertemanan dan investasi diri terhadap organisasi merupakan suatu bentuk investasi dan digunakan sebagai dasar evaluasi terhadap penghargaan (*reward*) yang telah diterima dari organisasi.

Lind & Tyler (dalam Tyler, 1994) mengusulkan model psikologi tentang keadilan prosedural. Model ini mengkaitkan masalah keadilan prosedural dengan motif relasional (*relational motive*). Model relasional ini menghubungkan persoalan keadilan dengan masalah pertalian sosial jangka panjang yang muncul antara individu dengan kelompok, institusi atau kelompok penguasa.

Saturated Justice model yang diungkapkan oleh Tyler (1994) dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:



Gambar 1
Saturated Justice model
(Sumber : Tyler, 1994)

Berdasarkan *Saturated Justice model* yang diungkapkan oleh Tyler (1994), model tersebut mengindikasikan bahwa terdapat dua motif psikologis dalam menjelaskan penilaian keadilan yaitu motif sumber daya (*resource motive*) dan motif relasional (*relational motive*). Penilaian keadilan distributif ditentukan oleh kedua motif, yaitu sumber daya dan relasional, sedangkan penilaian keadilan prosedural hanya ditentukan oleh motif relasional.

Berdasarkan konsep tersebut di atas, maka dalam penelitian ini akan mengungkap variabel penilaian keadilan prosedural, keadilan distributif, dan interaksional sebagai prediktor variabel partisipasi warga dalam program mitigasi bencana.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah “*adanya peranan yang signifikan variabel penilaian keadilan prosedural, distributif dan interaksional secara bersama-sama mempengaruhi variabel partisipasi warga dalam program mitigasi*” Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji peranan variabel penilaian keadilan prosedural, penilaian keadilan distributif dan penilaian keadilan interaksional terhadap variabel partisipasi warga dalam program mitigasi bencana.

Manfaat Penelitian ini adalah :

- a. *Manfaat secara teoritis adalah dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu psikologi pada umumnya dan psikologi sosial pada khususnya.*
- b. *Manfaat praktisnya adalah dapat memberikan masukan dalam menjelaskan faktor penilaian keadilan dalam partisipasi warga dalam program mitigasi bencana erupsi merapi.*

METODE

Partisipan

Partisipan penelitian adalah warga yang berdomisili di wilayah terdampak bahaya sekunder erupsi Merapi, yaitu di masyarakat yang tinggal di bantaran sungai Code wilayah Kotamadya Yogyakarta sebanyak 120 warga dengan teknik *insidental sampling*. Pengumpulan data dengan menggunakan metode survey dimana data diperoleh dengan menggunakan empat skala alat ukur, yaitu skala penilaian keadilan distributif, penilaian keadilan procedural, penilaian keadilan interaksional dan partisipasi warga dalam program mitigasi bencana.

Prosedur

Metode penskalaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penskalaan model Likert (*method of summated ratings*), merupakan metode penskalaan pernyataan sikap yang menggunakan distribusi respons sebagai dasar penentuan nilai skala. Partisipan akan diminta untuk menyatakan kesesuaiannya terhadap isi pernyataan dalam lima macam kategori jawaban. Dengan rentang jawaban dari *sangat sesuai* di skor 5 poin sampai jawaban *sangat tidak sesuai* diberi skor 1.

Teknik Analisis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi. Data dianalisis menggunakan program SPSS for windows.

ANALISIS & HASIL

Variabel penilaian keadilan distributif, prosedural dan interaksional secara bersama-sama memiliki sumbangan yang signifikan terhadap variabel partisipasi warga dalam program mitigasi bencana, ini dapat dilihat dari nilai F regresi sebesar 35,325 dengan $p < 0,01$. Sedangkan besarnya sumbangan ketiga variabel bebas tersebut sebesar $R^2 = 47,7\%$, hal ini mengandung arti bahwa 52,3% nya dipengaruhi oleh factor lain.

Secara lebih lanjut akan dibicarakan mengenai persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y = 4,699 + 0,12 X1 + 0,123 X2 + 0,07 X3$$

Keterangan :

Y : variabel partisipasi warga dalam program mitigasi bencana

X1 : Variabel penilaian keadilan distributif

X2 : Variabel penilaian keadilan prosedural

X3 : variabel penilaian keadilan interaksional

Bobot regresi variabel penilaian keadilan distributif terhadap dampak penilaian keadilan sebesar 0,12 berarti terdapat efek yang bersifat positif. Semakin tinggi penilaian keadilan distributif maka ada kecenderungan seseorang akan lebih berpartisipasi dalam program mitigasi bencana.

Bobot regresi variabel penilaian keadilan prosedural terhadap dampak penilaian keadilan sebesar 0,123. Variabel penilaian keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap partisipasi dalam program mitigasi bencana.

Bobot regresi variabel penilaian keadilan interaksional terhadap variabel dampak penilaian keadilan sebesar 0,07 berarti terdapat pengaruh yang arahnya positif. Semakin tinggi penilaian keadilan interaksional maka seseorang cenderung akan lebih berpartisipasi dalam program mitigasi bencana.

Apabila dilihat dari besarnya bobot regresi ketiga variabel bebas di atas, maka variabel penilaian keadilan prosedural memiliki sumbangan yang terbesar dibanding dengan kedua variabel bebas lainnya. Hal ini memberi gambaran bahwa tingkat partisipasi dalam program mitigasi bencana, cenderung ditentukan oleh bagaimana prosedur mitigasi diberlakukan.

DISKUSI

Berkaitan dengan penilaian keadilan prosedural, maka seseorang yang telah merasa terpenuhi harapannya, merasa beruntung dan dapat merasakan manfaat dari bantuan yang telah diterima akan cenderung menilai bahwa prosedur yang digunakan dalam pengaturan pembagian sebagai sesuatu yang adil atau keadilan prosedural telah terpenuhi. Hal ini sesuai dengan pendapat Walster, Walster & Berscheid (dalam Tyler, 1994) yang menyatakan bahwa seseorang akan menerima peraturan yang telah ditetapkan dalam kelompok, karena menyakini bahwa dengan penerimaan tersebut akan dapat memaksimalkan hasil yang diperoleh.

Faturochman (2002) mengatakan bahwa apabila harapan telah terpenuhi dan kesejahteraan yang semakin tinggi akan meningkatkan penilaian keadilan distributif. Peningkatan ini akan membawa imbas terhadap penilaian keadilan prosedural. Hal ini

sejalan dengan pendapat Stroessner & Heuer (dalam Faturochman, 2002b) yang mengatakan bahwa ketika kepentingan (*interest*) telah terpuaskan oleh hasil, maka akan terjadi hubungan keadilan distributif mempengaruhi penilaian keadilan prosedural, sebagai akibat dari *illusory correlation* dan *self serving bias*. Hubungan ini diperkuat dengan hasil analisis data yang menunjukkan adanya korelasi antara variabel penilaian keadilan distributif dan keadilan prosedural sebesar $r_{xy} = 0,758$.

Warga terdampak bahaya sekunder merapi (banjir lahar dingin) yang telah menerima bantuan pemerintah selama evakuasi, kemudian menilai bahwa bantuan tersebut telah sesuai dengan harapan sebelumnya, merasa lebih beruntung dibanding orang lain dan menganggap bantuan tersebut sangat bermanfaat, maka cenderung akan menilai bahwa pembagian tersebut sebagai sesuatu yang adil atau keadilan distributif telah terpenuhi. Menurut Faturochman (2002) makin sesuai kenyataan dengan harapan maka makin dirasakan adanya keadilan. Hal ini didukung pendapat Tyler (1994) yang mengatakan bahwa model sumber daya berkontribusi dalam memahami keadilan distributif.

Model relasional menghubungkan persoalan keadilan dengan masalah pertalian sosial jangka panjang yang muncul antara individu dengan kelompok, institusi atau kelompok penguasa. Pertalian yang bersifat jangka panjang inilah, menjadikan orang-orang memperhatikan tiga aspek, yaitu netralitas (*neutrality*), penghargaan (*standing*) dan dapat dipercaya (*trust*).

Ketiga aspek yaitu netralitas, penghargaan dan kepercayaan tersebut merupakan indikator keadilan interaksional. Apabila warga menilai bahwa orang-orang yang terlibat atau petugas dalam program penanggulangan bencana menunjukkan netralitas, memperlakukan warga dengan penuh penghargaan serta mempercayai bahwa para pengelola benar-benar memperjuangkan hak mereka, maka hal tersebut menjadi bukti bahwa mereka diterima di dalam kelompok dan merasa memiliki status yang tinggi. Selanjutnya mereka cenderung menilai bahwa prosedur yang telah dijalankan sebagai sesuatu yang adil atau telah terpenuhi keadilan prosedural. Demikian pula mengenai masalah pembagian (distribusi), warga yang merasa diperlakukan dengan netral, dihargai dan mempercayai pengelola, maka cenderung akan menilai pembagian atau bantuan yang diterimanya sebagai sesuatu yang adil atau telah terpenuhi keadilan distributif.

Faturochman (2002) mengungkapkan bahwa salah satu faktor psikologis yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan penilaian keadilan adalah norma internal. Setiap individu memiliki ukuran tertentu dalam menilai sesuatu. Ukuran tersebut menjadi bagian pada norma internal individu, norma internal bisa mengambil acuan dari lingkungan sosial atau nilai-nilai budaya yang berlaku. Menurut Fischer & Smith (2004) perbedaan budaya dapat mempengaruhi dalam penilaian keadilan terhadap suatu sistem distribusi yang ditetapkan.

Sebagian besar masyarakat yang terdampak bahaya sekunder Gunung Merapi adalah bagian dari masyarakat Jawa, dimana pola interaksi dan cara bersikap terhadap lingkungan diwarnai oleh nilai-nilai Jawa. Setiap nilai-nilai tersebut akan mempengaruhi cara seseorang dalam bersikap dan bertidak dalam kehidupan pergaulan maupun ketika menghadapi suatu kondisi yang tidak biasa, misalnya bencana alam dan kejadian-kejadian lain.

Atmojo (2006) mengungkapkan terdapat beberapa ciri yang membentuk citra diri orang Jawa, diantaranya yang berkaitan dengan cara bersikap menghadapi musibah adalah tidak mudah terkejut (*ojo kagetan*) yaitu jangan mudah terkejut dengan peristiwa aneh

yang menyergap kehidupan, dan jangan mudah heran (*oyo gumunan*) tidak mudah heran, dan jangan mudah takjub sehingga akan menimbulkan sabar, rela, ikhlas dan menerima cobaan karena alam punya hukum sendiri.

Demikian pula Suseno (1988) dan Mulder (1996) menjelaskan bahwa terdapat sikap *nrimo* dan *rilo* dalam etika Jawa. *Nrimo* adalah menerima segala apa yang mendatangi kita, tanpa protes dan pemberontakan, meskipun dalam keadaan kecewa dan kesulitan tetap menggunakan rasional, tidak ambruk, tidak menentang, tetap gembira dalam penderitaan dan keprihatinan. *Rilo* adalah kesanggupan melepaskan hak milik, kemampuan dan hasil pekerjaan sendiri apabila itulah yang menjadi tuntutan tanggung jawab atau nasib.

Berkaitan dengan nilai-nilai orang Jawa tersebut, maka ketika menghadapi musibah seberat apapun seperti musibah banjir lahar dingin mereka merasa dapat menerima dengan lapang dada sebagai kenyataan yang harus dihadapi dan tetap tegar untuk berusaha kembali pada keadaan semula tanpa menyalahkan pihak lain.

Hubungan pergaulan dengan orang lain sangat diperhatikan dalam nilai-nilai masyarakat Jawa dan berlaku dalam berbagai kondisi yang dihadapi. Sebagaimana dikatakan Suseno (1988) terdapat 2 kaidah yang paling menentukan pola pergaulan dalam masyarakat Jawa yaitu prinsip kerukunan dan prinsip hormat. Dalam setiap situasi, manusia hendaknya bersikap sedemikian rupa sehingga tidak sampai menimbulkan konflik (prinsip kerukunan) dan agar manusia dalam cara bicara dan membawa diri selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, sesuai dengan derajat dan kedudukannya (prinsip hormat). Demikian selanjutnya Soetrisno (1997) mengatakan terdapat sifat toleransi dan *prasojo* yaitu sederhana, natur (wajar) tidak dibuat-buat dalam karakter masyarakat Jawa.

Keyakinan terhadap nilai – nilai Jawa tersebut ternyata memiliki pengaruh besar bagi warga Yogyakarta dalam menghadapi musibah banjir lahar dingin Gunung Merapi, bahwa di satu sisi mereka sangat membutuhkan bantuan atau dukungan dari pihak lain, namun di sisi lain mereka tetap berusaha mempertahankan hubungan baik diantara warga masyarakat.

SIMPULAN & SARAN

Kesimpulan yang dapat diambil berkaitan dengan penelitian ini adalah diterimanya hipotesis yang diajukan yaitu variabel penilaian keadilan distributif dan variabel penilaian keadilan prosedural dan variabel penilaian keadilan interaksional secara bersama-sama mempengaruhi variabel partisipasi warga dalam program mitigasi bencana.

Saran yang disampaikan adalah bahwa pada saat masyarakat menghadapi bencana besar dan kemudian mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah, maka sebaiknya perlu memperhatikan masalah nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial yang dimaksud adalah netralitas, kepercayaan dan penghargaan. Netralitas berkaitan dengan bagaimana tokoh masyarakat dapat berlaku netral kepada setiap warganya. Kepercayaan berkaitan dengan upaya-upaya menjaga kepercayaan masyarakat kepada para tokoh atau pimpinan. Penghargaan adalah suatu kondisi dimana setiap warga merasa diperhatikan, dihargai keberadaannya di dalam kelompok masyarakat. Apabila nilai – nilai sosial tersebut dapat ditegakkan, maka akan dapat menciptakan sebuah keadilan.

Sebagai upaya untuk dapat mempertahankan nilai-nilai sosial maka sangat diperlukan fasilitasi dari pemerintah agar netralitas, kepercayaan dan penghargaan tetap terpelihara di

masyarakat. Hal ini mengingatkan bahwa dalam kondisi bencana alam yang luar biasa, ada kecenderungan meningkatnya dorongan untuk mencapai harapan-harapan pribadi dibanding kepentingan bersama.

Pemerintah juga diharapkan untuk dapat memberikan informasi yang jelas berhubungan dengan bantuan yang akan diberikan. Hal ini berkaitan dengan motif-motif sumber daya yang meliputi kesesuaian bagian (*outcome*) yang diterima, perbandingan *outcome* yang telah diterima dengan yang harapan sebelumnya, perbandingan *outcome* yang diterima orang lain. Apabila warga masyarakat korban bencana merasa mendapatkan bantuan yang sesuai / pantas, tidak ada kesenjangan antara harapan dengan bantuan yang diterima dan menilai bahwa ia mendapatkan bantuan sebagaimana yang telah diterima orang lain, maka hal ini akan menimbulkan penilaian keadilan yang tinggi.

Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya mengikutsertakan variabel-variabel lain sebagai kontrol. Dalam hal alat ukur disarankan untuk memperbanyak jumlah aitem-aitem yang digunakan dalam mengungkap suatu konstruk untuk mendapatkan tingkat validitas dan reliabilitas alat ukur yang lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

- Atmojo, S.S. (2006). *Citra diri orang jawa*. Yogyakarta : Penerbit Narasi.
- Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Propinsi Jawa Barat, 2004. *West Java Province Environmental Strategy*. Bandung
- Bartol, M.K., Durham, C.C. & Poon, M.J. (2001) Influence of performance evaluating rating segmentation on motivation and fairness perception. *Journal of Applied Psychology*. Vol 86 (6) 1106 – 1119.
- Colquitt, J.A. (2001). On the dimensionality of organizational justice : A construct validation of measure. *Journal of Applied Psychology*. Vol 86 (3) 386 – 400.
- Faturochman. (2002). *Keadilan perspektif psikologi*. Yogyakarta : Unit Penerbitan Fakultas Psikologi UGM dengan Pustaka Pelajar.
- Feather, N.T. (1994). Human value and their relation to justice. *Journal of Social Issues*. Vol 50 (4) 129-151.
- Fischer, R & Smith, B.P.(2004). Values and organizational justice : performance and seniority based allocation criteria in United Kingdom and Germany. *Journal of Cross Culture Psychology*. Vol 35 (6). 669-688.
- Moorman, R (1991). Relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior : Do fairness perceptions influence employee citizenships? *Journal of Applied Psychology*. Vol 76 (6) 845 – 855.
- Mulder, N. (1996). *Pribadi dan masyarakat di jawa*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Rachmat, A. 2006. Manajemen dan mitigasi bencana. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat.
- Sadisun I A., 2006. *Kajian ketidakstabilan lereng dan kerentanan gerakan massa*. ITB.
- Suseno, F.M. (1988). *Etika jawa. sebuah analisa tentang kebijaksanaan hidup orang jawa*. Jakarta : Penerbit PT. Gramedia.
- Soetrisno. (1997). *Falsafah hidup pancasila sebagaimana tercermin dalam falsafah hidup orang jawa*. Yogyakarta : Penerbit Pandawa.

- Tang, T.L. & Baldwin, L.J. (1996). Distributif and procedural justice as related to satisfaction and commitmen. *Journal of SAM Advanced Management*. Vol 61 (3)
- Taylor, M.S., Tracy, K.B., Renard. M.K., Harrison, J.K., & Carrol S.J. (1995). Due process in performance appraisal :A quasi – experimen in procedural justice. *Journal : Administrative Science Quarterly*. Vol 40 (3) 455.
- Tyler, T.R. (1994). Psychological model of the justice motive : Antecedents of distributif and procedural justice. *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol 67 (5). 850 – 863.
- Van den Bos, K. (2003). On subjective quality of social justice : The role of affect information in the psychology of justice judgments. *Journal of Personality and Social Psychology*, 81, 616-626.
- Warner, J.C. , Hegtvedt, K.A. & Roman, P. (2005). Procedural justice, distributif justice : How experience with downsizing condition their impact on organizational commitment. *Social Psychology Quarterly*. Vol 68 (1) 89 – 102.